



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0542/BAG. HUKUM/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0120/BAG. HUKUM/2025 TENTANG PERENCANAAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0120/BAG. HUKUM/2025 tentang Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0319/BAG. HUKUM/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0120/BAG. HUKUM/2025 tentang Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tahun 2025, perlu dilakukan perubahan dalam rangka tertib administrasi Pembentukan Peraturan Bupati di lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0120/BAG. HUKUM/2025 tentang Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

2. Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0120/BAG. HUKUM/2025 tentang Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0319/BAG. HUKUM/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0120/BAG. HUKUM/2025 tentang Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0120/BAG. HUKUM/2025 tentang Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tahun 2025.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah perubahan pada lampiran yang memuat penambahan 17 (tujuh belas) Rancangan Peraturan Bupati pada nomor urut 48 sampai dengan 64 dalam program pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI DONGGALA,

The image shows a circular official stamp of the Bupati of Donggala. The stamp features a central emblem with a bird (Garuda) and the text "BUPATI DONGGALA" around the perimeter. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0542/BAG. HUKUM /2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
DONGGALA NOMOR 188.45/0120/BAG. HUKUM/2025
TENTANG PERENCANAAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TAHUN 2025

NO	JENIS	TENTANG	POKOK MATERI	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET.
				BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PERATURAN BUPATI	BESARAN PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025	PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025	BARU		PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	JANUARI TAHUN 2025	
2.	PERATURAN BUPATI	PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PENDAU TAMBU	PENGATURAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PENDAU TAMBU	BARU		PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 79 TAHUN 2018 TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	BAGIAN EKONOMI	JANUARI TAHUN 2025	
3.	PERATURAN BUPATI	PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS DI KABUPATEN DONGGALA	PENGATURAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS DI KABUPATEN DONGGALA	BARU		PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 79 TAHUN 2018 TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	BAGIAN EKONOMI	JANUARI TAHUN 2025	
4.	PERATURAN BUPATI	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAMBILAN CONTOH UJI KUALITAS LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DONGGALA	MENGATUR PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAMBILAN CONTOH UJI KUALITAS LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DONGGALA	BARU		UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	FEBRUARI TAHUN 2025	
5.	PERATURAN BUPATI	PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2025	PEDOMAN DALAM PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	BARU		PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BAGIAN ORGANISASI	MARET TAHUN 2025	

6.	PERATURAN BUPATI	RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TANANTOVEA	RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TANANTOVEA	BARU		PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG RTRW TAHUN 2022-2042	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	MARET TAHUN 2025	
7.	PERATURAN BUPATI	PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN DONGGALA	PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN DONGGALA	BARU		PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	MARET TAHUN 2025	
8.	PERATURAN BUPATI	POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN DONGGALA	PENGATURAN TERHADAP POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN DONGGALA	BARU		PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 79 TAHUN 2018 TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	DINAS KESEHATAN	MARET TAHUN 2025	
9.	PERATURAN BUPATI	STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LINGKUP KABUPATEN DONGGALA	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LINGKUP KABUPATEN DONGGALA	BARU		PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 79 TAHUN 2018 TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	DINAS KESEHATAN	MARET TAHUN 2025	
10.	PERATURAN BUPATI	RENCANA STRATEGIS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LINGKUP KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024-2029	PEDOMAN RENCANA STRATEGIS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LINGKUP KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024-2029	BARU		PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 79 TAHUN 2018 TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	DINAS KESEHATAN	MARET TAHUN 2025	
11.	PERATURAN BUPATI	PEMBAGIAN JASA LAYANAN PADA UOBK BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABELOTA KABUPATEN DONGGALA	PENGATURAN TERHADAP PEMBAGIAN JASA LAYANAN PADA UOBK BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABELOTA KABUPATEN DONGGALA	BARU		UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT	RSUD KABELOTA	MARET TAHUN 2025	
12.	PERATURAN BUPATI	PETUNJUK TEKNIK PENYALURAN BANTUAN PAKAIAN SERAGAM BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN DONGGALA	PEDOMAN TERHADAP PETUNJUK TEKNIK PENYALURAN BANTUAN PAKAIAN SERAGAM BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN DONGGALA	BARU		PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM INDONESIA PINTAR	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	MARET TAHUN 2025	
13.	PERATURAN BUPATI	PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL	PEDOMAN PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL	BARU		PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 79 TAHUN 2014 TENTANG MUATAN LOKAL KURIKULUM 2013	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	MARET TAHUN 2025	
14.	PERATURAN BUPATI	PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA	TERWUJUDNYA INFORMASI ANTARA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI	BARU		PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	APRIL TAHUN 2025	

15.	PERATURAN BUPATI	PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEJABAT ATAU PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEJABAT ATAU PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	BARU		PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 63 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU TUNJANGAN KEPADA PEJABAT ATAU PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	APRIL TAHUN 2025	
16.	PERATURAN BUPATI	ANALISIS STANDAR BELANJA	PENGATURAN TERHADAP ANALISIS STANDAR BELANJA	BARU		PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	APRIL TAHUN 2025	
17.	PERATURAN BUPATI	SEWA KENDARAAN	PENGATURAN TERHADAP SEWA KENDARAAN	BARU		PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	APRIL TAHUN 2025	
18.	PERATURAN BUPATI	STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA	MENGATUR STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA	BARU		PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	APRIL TAHUN 2025	
19.	PERATURAN BUPATI	KRITERIA DAN MEKANISME PENETAPAN PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN DONGGALA	PENGATURAN TERHADAP KRITERIA DAN MEKANISME PENETAPAN PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN DONGGALA	BARU		PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMUTAKHIRAN DAN PENGGUNAAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL UNTUK BANTUAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN SOSIAL, DAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	DINAS SOSIAL	APRIL TAHUN 2025	
20.	PERATURAN BUPATI	PEMBERDAYAAN SOSIAL TERHADAP KOMUNITAS ADAT TERPENCIL	PEDOMAN PEMBERDAYAAN SOSIAL TERHADAP KOMUNITAS ADAT TERPENCIL	BARU		PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 186 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERDAYAAN SOSIAL TERHADAP KOMUNITAS ADAT TERPENCIL	DINAS SOSIAL	APRIL TAHUN 2025	
21.	PERATURAN BUPATI	MEKANISME PENETAPAN MASYARAKAT YANG MASUK KRITERIA MISKIN	MENGATUR MEKANISME PENETAPAN MASYARAKAT YANG MASUK KRITERIA MISKIN	BARU		PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	APRIL TAHUN 2025	
22.	PERATURAN BUPATI	PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER)	MENDUKUNG PERAN DAN LAYANAN APIP	BARU		PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	INSPEKTORAT	MEI TAHUN 2025	
23.	PERATURAN BUPATI	PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	MENGATUR PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	BARU		PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	MEI TAHUN 2025	
24.	PERATURAN BUPATI	PENGELOLAAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA	PENGATURAN TERHADAP PENGELOLAAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA	BARU		PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	MEI TAHUN 2025	
25.	PERATURAN BUPATI	PEDOMAN BEASISWA TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA	MENGATUR PEDOMAN BEASISWA TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA	BARU		PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	MEI TAHUN 2025	

26.	PERATURAN BUPATI	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2026	MEMBERIKAN KESERAGAMAN PEMAHAMAN DAN TINDAKAN BAGI PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA MAUPUN PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	BARU		PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	JUNI TAHUN 2025	
27.	PERATURAN BUPATI	RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	MENGATUR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	BARU		UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	JUNI TAHUN 2025	
28.	PERATURAN BUPATI	RENCANA KERJA TAHUN 2026	PEDOMAN TERHADAP RENCANA KERJA TAHUN 2026	BARU		PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	JUNI TAHUN 2025	
29.	PERATURAN BUPATI	PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025	PEDOMAN TERHADAP PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025	BARU		PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	JUNI TAHUN 2025	
30.	PERATURAN BUPATI	RENCANA AKSI DAERAH PANGAN GIZI	PENGATURAN TERHADAP RENCANA AKSI DAERAH PANGAN GIZI	BARU		PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN STRATEGIS PANGAN DAN GIZI	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	JUNI TAHUN 2025	
31.	PERATURAN BUPATI	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025-2029	PEDOMAN TERHADAP RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025-2029	BARU		PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	JUNI TAHUN 2025	
32.	PERATURAN BUPATI	PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025	PENGATURAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025	BARU		PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	JULI TAHUN 2025	

						JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH			
33.	PERATURAN BUPATI	RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI KABUPATEN DONGGALA	PEDOMAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI KABUPATEN DONGGALA	BARU		UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	JULI TAHUN 2025	
34.	PERATURAN BUPATI	PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING	PEDOMAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING	BARU		PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	JULI TAHUN 2025	
35.	PERATURAN BUPATI	FORUM KOMUNIKASI PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN	PENGATURAN KEDUDUKAN FORUM KOMUNIKASI PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA	BARU		UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	JULI TAHUN 2025	
36.	PERATURAN BUPATI	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH	PENYESUAIAN DALAM HAL BATAS MINIMAL KAPITALISASI, PENGHENTIAN/ PELEPASAN ASET TETAP DAN MASA MANFAAT PENYUSUTAN ASET TETAP		UBAH	PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	JULI TAHUN 2025	
37.	PERATURAN BUPATI	DONGGALA TANGGAP LAPORAN RAKYAT	PEDOMAN TERHADAP DONGGALA TANGGAP LAPORAN RAKYAT	BARU		PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH	INSPEKTORAT	JULI TAHUN 2025	
38.	PERATURAN BUPATI	PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	PENGATURAN TERHADAP PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	BARU		PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN UMUM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	JULI TAHUN 2025	
39.	PERATURAN BUPATI	KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH	PENGATURAN KOPERASI MERAH PUTIH BERDASARKAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERCEPATAN PEMBENTUKAN KEPRASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH	BARU		PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI & UMKM	AGUSTUS TAHUN 2025	
40.	PERATURAN BUPATI	PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH MELALUI PROGRAM SATU DESA SATU PRODUK (ONE VLLAGE ONE PRODUCT)	PENGATURAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DAN KEWILAYAHAN	BARU		UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN USAHA MENENGAH	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	AGUSTUS TAHUN 2025	
41.	PERATURAN BUPATI	KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH	PERATURAN PELAKSANA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH	BARU		PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUSNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA	BAGIAN ORGANISASI	NOVEMBER TAHUN 2025	

			NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA						
42.	PERATURAN BUPATI	KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH	PERATURAN PELAKSANA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA	BARU		PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA	BAGIAN ORGANISASI	NOVEMBER TAHUN 2025	
43.	PERATURAN BUPATI	KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SATUAN DAN INSPEKTORAT	PERATURAN PELAKSANA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA	BARU		PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA	BAGIAN ORGANISASI	NOVEMBER TAHUN 2025	
44.	PERATURAN BUPATI	TATA NASKAH DINAS DESA	PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DESA	BARU		UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	NOVEMBER TAHUN 2025	
45.	PERATURAN BUPATI	PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026	LANDASAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026	BARU		PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	NOVEMBER TAHUN 2025	
46.	PERATURAN BUPATI	TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA PADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2026	PENGATURAN TERHADAP TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA PADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2026	BARU		PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	NOVEMBER TAHUN 2025	
47.	PERATURAN BUPATI	TATA CARA PENYALURAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026	PENGATURAN TERHADAP TATA CARA PENYALURAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026	BARU		PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	NOVEMBER TAHUN 2025	
48.	PERATURAN BUPATI	DESAIN OLAHRAGA DAERAH KABUPATEN DONGGALA	PEDOMAN DESAIN OLAHRAGA DAERAH KABUPATEN DONGGALA	BARU		PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DESAIN OLAHRAGA DAERAH	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	NOVEMBER TAHUN 2025	
49.	PERATURAN BUPATI	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DONGGALA NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN,	PEDOMAN TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA PADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN		UBAH	PERATURAN BUPATI DONGGALA NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA PADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	NOVEMBER TAHUN 2025	

		PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA PADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025	2025						
50.	PERATURAN BUPATI	MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DAN POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL	PENGATURAN TERHADAP MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DAN POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL	BARU		PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	NOVEMBER TAHUN 2025	
51.	PERATURAN BUPATI	PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	PENGATURAN TERHADAP PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	BARU		UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	NOVEMBER TAHUN 2025	
52.	PERATURAN BUPATI	SISTEM INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH	PEDOMAN TERHADAP SISTEM INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH	BARU		PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	NOVEMBER TAHUN 2025	
53.	PERATURAN BUPATI	PENYELENGGARAAN INFORMASI PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PEDOMAN TERHADAP PENYELENGGARAAN INFORMASI PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	BARU		PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI PEMERINTAH DAERAH	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	NOVEMBER TAHUN 2025	
54.	PERATURAN BUPATI	PEMATAUAN STOK PANGAN MELALUI POS PEMANTAUAN/PORTAL DIPERBATASAN WILAYAH STRATEGIS DI KABUPATEN DONGGALA	TATA CARA PEMATAUAN STOK PANGAN MELALUI POS PEMANTAUAN/PORTAL DIPERBATASAN WILAYAH STRATEGIS DI KABUPATEN DONGGALA	BARU		PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG KETAHANAN PANGAN DAN GIZI	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	NOVEMBER TAHUN 2025	
55.	PERATURAN BUPATI	TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	PEDOMAN TERHADAP TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	BARU		PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA	BAGIAN ORGANISASI	NOVEMBER TAHUN 2025	
56.	PERATURAN BUPATI	TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PEDOMAN TERHADAP TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	BARU		PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA	BAGIAN ORGANISASI	NOVEMBER TAHUN 2025	
57.	PERATURAN BUPATI	TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PEDOMAN TERHADAP TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	BARU		PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA	BAGIAN ORGANISASI	NOVEMBER TAHUN 2025	
58.	PERATURAN BUPATI	TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UMKM	PEDOMAN TERHADAP TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UMKM	BARU		PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA	BAGIAN ORGANISASI	NOVEMBER TAHUN 2025	
59.	PERATURAN BUPATI	TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMUNIKASI	PEDOMAN TERHADAP TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DAN	BARU		PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA	BAGIAN ORGANISASI	NOVEMBER TAHUN 2025	

		INFORMATIKA	KOMUNIKASI INFORMATIKA						
60.	PERATURAN BUPATI	TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN	PEDOMAN TERHADAP TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN	BARU		PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA	BAGIAN ORGANISASI	NOVEMBER TAHUN 2025	
61.	PERATURAN BUPATI	TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PEDOMAN TERHADAP TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	BARU		PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA	BAGIAN ORGANISASI	NOVEMBER TAHUN 2025	
62.	PERATURAN BUPATI	TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PEDOMAN TERHADAP TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	BARU		PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA	BAGIAN ORGANISASI	NOVEMBER TAHUN 2025	
63.	PERATURAN BUPATI	TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN EKONOMI KREATIF	PEDOMAN TERHADAP TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN EKONOMI KREATIF	BARU		PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA	BAGIAN ORGANISASI	NOVEMBER TAHUN 2025	
64.	PERATURAN BUPATI	TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN RISET DAN INOVASI DAERAH	PEDOMAN TERHADAP TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN RISET DAN INOVASI DAERAH	BARU		PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA	BAGIAN ORGANISASI	NOVEMBER TAHUN 2025	

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI